

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Nasional adalah pembangunan masyarakat Indonesia dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik yang bersifat material maupun spiritual. Pada umumnya pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki. Seiring dengan perkembangan mengenai peraturan dan pelaksanaan pembangunan di berbagai negara. Negara Indonesia mengalami perubahan pembangunan, baik dari strategi ekonomi hingga strategi pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan model pembangunan masyarakat.

Dalam pembangunan nasional di Indonesia, pembanguan daerah yang tidak bisa terpisahkan dari pembangunan nasional dengan maksud untuk mengembangkan daerah. Berdasarkan undang-undang tentang desentralisasi dan otonomi daerah yang lebih baru memberikan peluang bagi daerah untuk mengembangkan sumber daya alam yang dimilikinya secara efisien dan optimal. Otonomi daerah diberi kewenangan dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus. Maka setiap pemerintah daerah berupaya untuk meningkatkan perekonomian daerahnya melalui perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diantaranya pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Pajak daerah merupakan komponen yang memberikan kontribusi terbesar. Dengan kontribusi pajak daerah yang semakin besar, maka akan semakin leluasa dalam memanfaatkan dana yang diperoleh dan akan menambah kepercayaan diri untuk melaksanakan tugas – tugas pemerintah daerah dan pembangunan daerah serta semakin tinggi kualitas otonominya.

Pajak daerah juga merupakan salah satu sumber penerimaan yang penting bagi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Arti penerimaan pajak daerah digunakan pemerintah untuk

membangun sarana dan prasarana sektor publik yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam menunjang kegiatan ekonomi masyarakat yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Mutiara, 2015).

Salah satu contohnya di Sulawesi Utara yang merupakan salah satu provinsi termaju di Kawasan Timur Indonesia. Sebagai sebuah provinsi perbatasan, Sulawesi Utara memiliki lokasi yang strategis sebagai penghubung ke Asia Timur dan Kawasan Maluku serta Papua. Provinsi ini dikaruniai sumber daya alam khususnya kekayaan alam laut. Dari segi sumber daya manusia kondisinya relatif lebih baik dibandingkan provinsi – provinsi lain di Kawasan Timur Indonesia.

Salah satu penyumbang pendapatan asli daerah yang terbesar dan selalu meningkat secara signifikan dalam lima tahun terakhir ini yaitu pada tahun 2012 hingga 2016 adalah pemasukan dari Pajak Daerah. Penerimaan Pajak Daerah untuk Provinsi Sulawesi Utara tahun 2012 sebesar Rp. 633.352.183.500 kemudian meningkat pada tahun 2013 menjadi Rp. 785.467.967.366 dan pada tahun 2014 meningkat sebesar Rp.938.583.020.354 pada tahun 2015 meningkat menjadi Rp. 1.012.945.961.386 dan terakhir di tahun 2016 turun menjadi Rp. 981.044.550.486 (Denny, Paulus, Daisy, 2018).

Kemampuan Pajak Daerah yang dimiliki setiap daerah merupakan indikator kesiapan pemerintah daerah dalam berotonomi daerah. Karena itu perolehan Pajak Daerah diarahkan dalam meningkatkan PAD yang digunakan untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang secara konseptual diharapkan memiliki kemampuan nyata dan bertanggung jawab.

Berkembangnya berbagai sektor ekonomi berdampak pada peningkatan pendapatan daerah salah satu indikator untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu daerah adalah dengan melihat angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), besar kecil angka PDRB yang dihasilkan tergantung sumber daya dan faktor – faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. Semakin besar PDRB maka akan mempengaruhi peningkatan penerimaan pajak daerah (Dyah, 2016). Pertumbuhan

ekonomi disuatu daerah ditunjukan dengan meningkatkan produksi barang dan jasa yang diukur dengan PDRB, maka PDRB dijadikan tolak ukur oleh pemerintahan

Dalam kebijakan daerah setiap daerah dituntut menjadi daerah yang inovatif dan kreatif dikarena Bekasi tidak memiliki wilayah yang luas maka pemerintah Bekasi lebih memfokuskan ke sektor – sektor industri. Jumlah industri itu sendiri terdiri dari jumlah usaha industri kecil, menengah, maupun besar yang berbasis agro dan non agro. Jumlah industri akan meramalkan perubahan yang terjadi dalam suatu daerah sehingga industri akan melakukan penyesuaian untuk meningkatkan keuntungan mereka.

Ketika semua faktor penentuan lokasi telah terpenuhi maka industri akan melakukan kegiatan industri di daerah tersebut. Jumlah industri yang meningkat sangat berpengaruh dengan pendapatan pajak itu sendiri, hal ini disebabkan industri yang melakukan kegiatan usaha akan mengurus perijinan, sehingga bertambahnya jumlah industri yang mengurus ijin usaha mengakibatkan penerimaan pajak daerahpun meningkat. Disamping itu, peran masyarakat sangat membantu dalam meningkatkan Pajak Daerah (Lulu, 2018). Banyaknya media yang dapat digunakan masyarakat dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah harus digali secara aktif dan kreatif.

Berdasarkan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2009 mengenai kepariwisataan, pariwisata merupakan berbagai kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Wisatawan yang datang juga akan melakukan sebuah kegiatan perjalanan dengan mengunjungi tempat tertentu dengan tujuan untuk rekreasi, pengembangan diri atau perjalanan bisnis. Berdasarkan perdataannya mayoritas turis yang datang selalu menghabiskan waktunya selama dua hari. Dengan begitu roda perekonomian terus tumbuh pesat. Banyaknya pengunjung yang datang sudah memungkinkan untuk mendongkakan pendapatan daerah.

Berdasarkan penjelasan dan permasalahan diatas, penulis ingin mengetahui mengenai pengaruh produk domestik regional bruto, jumlah penduduk, dan jumlah

industri terhadap pajak daerah, maka penulis mengambil judul **“PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO, JUMLAH INDUSTRI, JUMLAH WISATAWAN TERHADAP PAJAK DAERAH”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan diatas, maka penulis akan membahas pokok permasalahan sebagai berikut.

1. Apakah PDRB berpengaruh terhadap Pajak Daerah?
2. Apakah Jumlah Industri berpengaruh terhadap Pajak Daerah?
3. Apakah Jumlah Wisatawan berpengaruh terhadap Pajak Daerah?
4. Apakah PDRB, Jumlah Industri, Jumlah Wisatawan secara bersama – sama berpengaruh terhadap Pajak Daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. untuk mengetahui pengaruh tingkat PDRB terhadap Pajak Daerah;
2. untuk mengetahui pengaruh Jumlah Industri terhadap Pajak Daerah;
3. untuk mengetahui pengaruh Jumlah Wisatawan terhadap Pajak Daerah;
4. untuk mengetahui pengaruh PDRB, Jumlah Industri, Jumlah Wisatawan secara bersama terhadap Pajak Daerah.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut.

1. Bagi Peneliti

Meningkatkan pemahaman dan menambah pengetahuan dalam bidang perpajakan. Serta diharapkan memberi kontribusi untuk penelitian dimasa yang akan datang.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran bagi pemerintahan daerah setempat dalam menentukan kebijakan yang tepat untk meningkatkan pajak daerah.

3. Bagi Universitas

Penelitian ini dapat digunakan untuk menambah referensi sebagai bahan penelitian lanjutan yang lebih mendalam pada masa yang akan datang.

1.5 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Penelitian ini hanya membahas pajak daerah sebagai variabel dependen di wilayah kota Bekasi.
2. Penelitian ini hanya membahas mengenai PDRB, Jumlah Industri dan Jumlah Wisatawan pada tahun 2012 – 2017 sebagai variabel independen di wilayah Bekasi .

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan Latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian, sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka memuat literature yang mendasari topik penelitian pada umumnya, dan model konseptual pada umumnya.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Berisi Desain penelitian, tahapan penelitian, model konseptual penelitian, operasionalisasi variable, waktu, dan tempat penelitian, metode pengambilan sample, jenis dan sumber data, metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

BAB ini berisi penjelasan dari objek penelitian yang akan dibahas berupa perhitungan menggunakan alat analisis yang sesuai

BAB V PENUTUP

Berisi dari laporan hasil penelitian dan saran-saran penulis baik yang berlaku dengan kebijakan maupun saran penelitian.